

URGENSI ETIKA POLITIK ISLAM DALAM LEMBAGA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Pikal Saputra¹, Muhammad Audy Andy², Kurniati³

10200122111@uin-alauddin.ac.id¹, 10200122109@uin-alauddin.ac.id², kurniati@uin-alauddin.ac.id³

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai pentingnya politik Islam dalam pembangunan bangsa. Implementasi etika politik Islam dalam konteks lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki signifikansi yang mendalam dalam menjalankan fungsi legislatif berdasarkan prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai Islam. Penelitian ini mengkaji bagaimana prinsip keadilan dalam Islam dapat diterapkan dalam pembentukan kebijakan, pengambilan keputusan, dan tindakan legislasi yang adil dan berdaya guna. Etika politik Islam memandu anggota DPR untuk bertindak secara jujur, adil, dan transparan dalam memenuhi kewajiban mereka kepada rakyat. Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan kontemporer dan keragaman penafsiran terhadap nilai-nilai Islam, pentingnya etika politik ini dalam membangun sistem politik yang stabil, adil, dan berkelanjutan tidak dapat dipandang remeh. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif-interpretatif dengan melakukan studi literatur dari beberapa sumber primer dan sekunder. Data yang diperoleh akan dikumpulkan, dipelajari, dan disintesis untuk kemudian dianalisis secara seksama guna mendapatkan jawaban atas permasalahan yang diajukan.

Kata Kunci: Etika Politik Islam, Keadilan, DPR.

ABSTRACT

This research discusses the importance of Islamic politics in nation building. The implementation of Islamic political ethics in the context of the House of Representatives (DPR) institution has deep significance in carrying out legislative functions based on moral principles and Islamic values. This research examines how the principles of justice in Islam can be applied in policy formation, decision making and legislative action that are fair and effective. Islamic political ethics guides DPR members to act honestly, fairly and transparently in fulfilling their obligations to the people. Despite being faced with various contemporary challenges and diverse interpretations of Islamic values, the importance of this political ethic in building a stable, just and sustainable political system cannot be underestimated. The research method used is a qualitative-interpretive method by conducting literature studies from several primary and secondary sources. The data obtained will be collected, studied and synthesized and then analyzed carefully to get answers to the problems posed.

Keywords: Islamic Political Ethics, Justice, DPR.

PENDAHULUAN

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti etika dibedakan menjadi tiga. Pertama, ilmu tentang sesuatu yang baik dan yang buruk, serta mengenai hak dan kewajiban moral (akhlak). Kedua, gabungan asas atau nilai yang berkaitan dengan akhlak. Ketiga, nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan dan masyarakat.

Kebebasan merupakan hak yang imanen dengan keberadaan setiap individu sebagai seorang manusia sebagai makhluk yang memiliki akal budi, manusia, harus memiliki perilaku/tindakan yang baik. Hal demikian menjadi keniscayaan agar kehidupan manusia di tengah manusia lainnya dapat berjalan dengan baik, aman, serta nyaman, dimana tiap manusia akan tertanan sikap untuk saling membantu dan menghargai satu dengan lainnya. Dalam konteks inilah kemudian manusia menjadi makhluk beretika. Manusia adalah

mahluk ethos andmores, namun sayangnya tidak semua menyadari akan hal itu, sehingga tidak jarang banyak tergelincir dalam hal-hal yang menyimpang dari nilai kemahklukannya sebagai insan yang beretika dan bermoral.

Implementasi etika politik Islam dalam konteks lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengandung signifikansi yang mendalam dalam menjalankan fungsi negara berdasarkan prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai Islam. Sebagai lembaga legislatif yang mewakili suara rakyat, DPR memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan sosial yang diharapkan dalam ajaran Islam.

Islam sebagai agama universal tidak hanya menekankan pada hubungan individu dengan Tuhan, tetapi juga mengatur aspek kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Dalam konteks politik, etika Islam menuntut agar setiap tindakan dan keputusan yang diambil oleh pemimpin dan wakil rakyat harus sejalan dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, implementasi etika politik Islam tidak hanya menjadi kewajiban moral, tetapi juga keharusan dalam menjalankan urusan publik secara adil dan berintegritas.

Sejarah politik Islam memberikan landasan penting bagi pengembangan etika politik yang mencakup prinsip-prinsip keadilan dan pemerintahan yang baik. Mulai dari masa kehidupan Nabi Muhammad saw. yang menunjukkan teladan kepemimpinan yang adil, hingga masa-masa khalifah-khalifah Rasyidin yang dikenal dengan keadilan mereka dalam mengelola urusan umat, Islam telah menyediakan model-model yang relevan bagi praktik politik kontemporer.

Filosofi politik Islam juga memberikan kontribusi penting, dengan mengembangkan gagasan tentang keadilan sosial, kontrak sosial antara pemerintah dan rakyat, serta pentingnya konsultasi (syura) dalam pengambilan keputusan politik. Konsep-konsep ini tidak hanya bersifat teoretis, tetapi telah diimplementasikan dalam praktik politik di berbagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim.

Namun, implementasi etika politik Islam dalam DPR juga dihadapkan pada berbagai tantangan kontemporer. Globalisasi, modernisasi, dan dinamika politik internal negara-negara Muslim sering kali menimbulkan konflik antara prinsip-prinsip Islam dan tuntutan-tuntutan kontemporer. Selain itu, isu-isu seperti korupsi, nepotisme, dan kurangnya akuntabilitas sering kali menjadi hambatan dalam mewujudkan visi politik Islam yang ideal.

Di samping itu, keragaman dalam penafsiran terhadap prinsip-prinsip Islam juga menjadi faktor yang mempengaruhi implementasi etika politik dalam konteks DPR. Berbagai aliran dan pandangan dalam Islam sering kali memiliki interpretasi yang berbeda terhadap nilai-nilai politik, yang dapat mempengaruhi cara pandang terhadap keadilan dan tanggung jawab sosial.

Dengan mempertimbangkan kompleksitas dan relevansi isu ini, tujuan dari tulisan ini adalah untuk menjelaskan esensi aspek keadilan dalam implementasi etika politik Islam terhadap DPR. Melalui analisis mendalam, kita akan mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip keadilan dalam Islam dapat diaplikasikan dalam pembentukan kebijakan, pengambilan keputusan, dan tindakan legislasi yang adil dan berdaya guna.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang hubungan antara Islam dan politik dalam konteks legislatif, tetapi juga mengilustrasikan pentingnya membangun sistem politik yang berdasarkan nilai-nilai universal keadilan, sesuai dengan ajaran agama Islam yang menghormati pluralisme dan keberagaman masyarakat.

Etika politik adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam pembangunan dan evolusi sebuah bangsa. Hal ini mengacu pada kajian tentang prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang membimbing perilaku politik, baik oleh individu maupun oleh lembaga-lembaga

pemerintah. Dalam sebuah konteks politik, etika menuntut refleksi moral tentang tindakan dan keputusan yang diambil dalam mengelola kepentingan publik.

Pentingnya etika politik dalam pembangunan bangsa tidak dapat diabaikan. Didalamnya terdapat implikasi langsung terhadap proses pengambilan keputusan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga politik. Secara esensial, etika politik menentukan jalan bagi pemimpin dan negara dalam menjalankan tugas mereka secara adil, transparan, dan bertanggung jawab.

Dalam setiap fase pembangunan suatu bangsa, etika politik memainkan peran yang sangat penting. Pada tahap awal, ketika sebuah bangsa baru merdeka atau sedang berusaha membangun sistem politiknya, etika politik memandu proses pembentukan konstitusi, pembuatan undang-undang, serta penataan lembaga-lembaga pemerintahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip moral.

Dalam konteks global yang semakin terinterkoneksi, etika politik juga menjadi dasar bagi hubungan antarbangsa yang saling menguntungkan. Kedaulatan negara harus dihormati, sementara pada saat yang sama, kepentingan bersama dan kerja sama antar bangsa harus didasarkan pada prinsip-prinsip moral yang mendasar, termasuk persamaan keadilan, dan perdamaian.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pentingnya etika politik dalam pembangunan bangsa tidak bisa dilebih-lebihkan. Etika politik bukan hanya menjadi landasan moral bagi tindakan politik, tetapi juga merupakan kunci untuk menciptakan tatanan politik yang stabil, adil, dan berkelanjutan. Dengan memprioritaskan prinsip-prinsip moral dalam setiap keputusan dan tindakan politik, sebuah bangsa dapat memastikan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh warganya, serta berkontribusi pada perdamaian dan kemajuan global.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian library research yaitu penelitian dengan studi pustaka sebagai bahan rujukan utama dalam penelitian. Peneliti menggunakan literatur bacaan seperti jurnal-jurnal ilmiah yang relevan dengan judul yang dibahas, serta buku-buku maupun dokumen-dokumen yang relevan. Setelah mengumpulkan bahan bacaan, selanjutnya peneliti meninjau kembali hal hal yang perlu di analisis dan dikaji kembali sesuai dengan pemahaman yang peneliti dapatkan. Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan normatif yuridis dan nomatif syar'i, dengan menfokuskan pada pengkajian ayat-ayat, hadis, hasil ijtihad ulama dan data-data lainnya yang amat relevan dengan penelitian, sehingga penulis dapat menuturkan pokok-pokok pembahasan kesimpulan serta implikasi pada penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi prinsip-prinsip etika politik islam pada lembaga dewan perwakilan rakyat.

Etika politik dalam DPR mencakup prinsip-prinsip moral dan perilaku yang diharapkan dari anggota DPR dalam menjalankan tugas mereka sebagai perwakilan rakyat. Berikut adalah beberapa aspek penting dari etika politik dalam DPR:

- 1. Kehormatan dan Integritas:** Anggota DPR diharapkan menjaga tinggi integritas dan kehormatan dalam semua aspek kehidupan pribadi dan publik mereka. Hal ini mencakup menghindari konflik kepentingan, menolak gratifikasi, dan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab kepada rakyat yang mereka wakili.

Tugas-tugas seorang anggota DPR menuntut mereka untuk memelihara standar tinggi dalam integritas dan kehormatan, baik dalam kehidupan pribadi maupun publik mereka. Salah satu aspek krusial dalam menjalankan peran ini adalah menghindari konflik kepentingan. Anggota DPR diharapkan untuk menjaga agar kepentingan pribadi atau kelompok tidak mempengaruhi keputusan atau tindakan yang mereka ambil sebagai wakil rakyat. Dengan kata lain, mereka harus tetap fokus pada kepentingan masyarakat yang mereka perwakili, menjauhkan diri dari situasi yang dapat mempengaruhi objektivitas dan kualitas keputusan mereka.

Selain itu, anggota DPR juga diharapkan untuk menolak gratifikasi. Gratifikasi atau pemberian yang mungkin diterima dari pihak lain dapat membahayakan integritas mereka dan mempengaruhi independensi dalam menjalankan tugas sebagai legislator. Dengan menolak gratifikasi, mereka menegaskan komitmen mereka untuk bertindak atas dasar prinsip dan hukum, bukan kepentingan pribadi atau materi.

Integritas juga tercermin dalam tanggung jawab mereka kepada rakyat yang mereka wakili. Sebagai pembuat kebijakan, mereka memiliki kewajiban moral dan etis untuk menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, transparansi, dan akuntabilitas. Ini berarti mereka harus selalu bertindak sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang memilih mereka untuk mewakili suara dan kepentingan mereka di tingkat legislatif. Dengan menjalankan tugas ini dengan integritas yang tinggi, anggota DPR tidak hanya membangun kepercayaan publik tetapi juga memastikan bahwa keputusan mereka benar-benar mencerminkan kepentingan masyarakat yang luas, bukan sekadar kelompok atau kepentingan individual tertentu.

2. Transparansi dan Akuntabilitas: Etika politik menuntut adanya transparansi dalam proses legislatif dan penggunaan anggaran. Informasi mengenai keputusan-keputusan dan kebijakan yang dibuat harus tersedia untuk publik. Anggota DPR juga harus siap dipertanggungjawabkan atas tindakan mereka di hadapan rakyat.

Dalam konteks etika politik, transparansi dan akuntabilitas memainkan peran penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif. Transparansi mengharuskan bahwa setiap langkah dalam proses legislatif, termasuk penggunaan anggaran, dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Informasi mengenai keputusan-keputusan dan kebijakan yang dihasilkan harus mudah diakses oleh publik, memungkinkan masyarakat untuk memahami dan menilai kinerja anggota DPR. Di samping itu, akuntabilitas menjadi prinsip yang tak terpisahkan, di mana anggota DPR harus siap untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka kepada rakyat yang mereka wakili. Ini mencakup menghadapi pertanyaan, kritik, dan evaluasi atas keputusan-keputusan yang dibuat dalam kapasitas mereka sebagai pembuat kebijakan. Dengan menerapkan transparansi dan akuntabilitas secara konsisten, anggota DPR tidak hanya membangun fondasi yang kuat untuk integritas lembaga legislatif, tetapi juga memastikan bahwa representasi dan keputusan yang mereka hasilkan benar-benar mencerminkan kepentingan dan aspirasi rakyat Indonesia secara luas.

3. Representasi dan Pelayanan Publik: Sebagai perwakilan rakyat, anggota DPR memiliki tanggung jawab untuk mengartikulasikan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat yang mereka wakili. Hal ini mencakup melakukan pelayanan publik dengan baik, serta berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai wakil rakyat, anggota DPR bertanggung jawab tidak hanya untuk menyuarakan, tetapi juga untuk mengambil langkah konkret dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat yang mereka wakili. Tugas ini meliputi kewajiban untuk mengartikulasikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di dalam gedung legislatif, serta untuk memastikan bahwa keputusan dan kebijakan yang dihasilkan secara efektif memenuhi

kepentingan masyarakat luas. Selain itu, tanggung jawab mereka juga meliputi pelayanan publik yang berkualitas, yang mencakup responsif terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh konstituennya dan menyediakan bantuan yang dibutuhkan. Dengan berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, anggota DPR tidak hanya menjalankan fungsi legislatif, tetapi juga menjadi agen perubahan yang berperan penting dalam menciptakan dampak positif bagi rakyat yang mereka wakili.

4. Etika Berbicara dan Berperilaku: Dalam setiap interaksi di DPR, anggota harus menggunakan bahasa yang sopan dan menghormati pendapat anggota lainnya. Mereka harus menjauhi diskusi yang bersifat memecah belah atau provokatif, serta menunjukkan perilaku yang mencerminkan martabat lembaga legislatif.

Dalam setiap sesi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), setiap anggota diberikan tanggung jawab yang besar untuk memastikan bahwa interaksi mereka mencerminkan etika dan tata krama yang tinggi. Hal ini tidak hanya mencakup penggunaan bahasa yang sopan dan penuh penghormatan terhadap pendapat sesama anggota, tetapi juga menuntut mereka untuk menjauhi segala bentuk diskusi yang dapat memecah belah atau menghasut. Keberadaan di ruang legislatif mengharuskan mereka untuk mengedepankan dialog yang konstruktif, di mana setiap pandangan didengar dengan serius dan dipertimbangkan secara adil. Pentingnya menjaga martabat lembaga legislatif tidak hanya terletak pada representasi publik yang baik, tetapi juga dalam membangun kerja sama antaranggota yang harmonis untuk mencapai tujuan bersama dalam melayani kepentingan masyarakat.

Setiap perilaku yang ditunjukkan oleh anggota DPR seharusnya menjadi contoh yang baik bagi masyarakat, menunjukkan dedikasi mereka terhadap tugas dan tanggung jawab sebagai wakil rakyat. Ini mencakup sikap yang transparan, bertanggung jawab, dan berorientasi pada hasil yang dapat membawa manfaat konkret bagi rakyat. Dengan mematuhi prinsip-prinsip ini, anggota DPR bukan hanya menjalankan fungsi legislasi, tetapi juga membangun fondasi yang kuat untuk kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif secara keseluruhan. Dengan demikian, setiap interaksi di DPR bukan hanya sekadar pertemuan formal, tetapi juga merupakan kesempatan untuk menunjukkan komitmen mereka terhadap nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan kehormatan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan melayani kepentingan masyarakat dengan sebaik-baiknya.

5. Kolaborasi dan Konsensus: Meskipun terdapat perbedaan pendapat, anggota DPR diharapkan untuk bekerja sama dengan anggota lainnya untuk mencapai konsensus dalam pengambilan keputusan. Kolaborasi antarfraksi dan partai politik menjadi hal penting dalam mencapai hasil yang optimal bagi kepentingan bersama.

Meskipun setiap anggota DPR dapat memiliki perbedaan pendapat yang signifikan, mereka diminta untuk bekerja sama dengan anggota lainnya dalam semangat kolaborasi untuk mencapai konsensus dalam proses pengambilan keputusan. Ini berarti menghargai dan mengintegrasikan berbagai sudut pandang dan kepentingan dari berbagai fraksi dan partai politik untuk mencapai hasil yang paling menguntungkan bagi masyarakat yang mereka wakili. Kolaborasi yang efektif tidak hanya menjamin representasi yang inklusif dan adil dari berbagai perspektif dalam proses legislasi, tetapi juga memperkuat legitimasi keputusan yang dihasilkan oleh DPR. Dengan bekerja bersama lintas fraksi dan partai politik, anggota DPR mampu menghasilkan keputusan yang lebih komprehensif dan mendukung, yang merupakan cermin dari komitmen mereka terhadap pelayanan masyarakat dan kepentingan bersama dalam sistem demokrasi.

6. Penghormatan terhadap Proses Hukum dan Konstitusi: Sebagai bagian dari lembaga negara, anggota DPR harus menghormati dan mematuhi aturan hukum serta prinsip-prinsip yang tercantum dalam konstitusi. Mereka memiliki peran penting dalam memastikan supremasi hukum dan keadilan di dalam negara.

Sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), mereka memiliki tanggung jawab yang besar untuk menghormati dan mematuhi aturan hukum yang berlaku serta prinsip-prinsip yang tertuang dalam konstitusi. Peran mereka tidak hanya terbatas pada membuat dan mengesahkan undang-undang, tetapi juga dalam memastikan supremasi hukum dan menjaga keadilan di seluruh negara. Dengan mematuhi aturan hukum dan mengikuti ketentuan konstitusi, anggota DPR menegaskan komitmennya untuk bertindak sesuai dengan norma-norma yang mengatur tata kelola negara secara adil dan transparan. Mereka bertanggung jawab untuk menjalankan fungsi legislatif mereka dengan penuh integritas, menjaga keseimbangan kekuasaan antara lembaga negara, serta melindungi hak-hak dan kebebasan warga negara sebagaimana yang dijamin dalam konstitusi. Dengan demikian, partisipasi mereka dalam proses legislasi tidak hanya membangun fondasi hukum yang kokoh, tetapi juga mencerminkan komitmen yang kuat terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan di Indonesia.

Penerapan etika politik yang kuat dalam DPR tidak hanya penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif, tetapi juga untuk memperkuat demokrasi dan menjaga prinsip-prinsip Pancasila sebagai landasan negara.

B. Keutamaan etika politik Islam pada lembaga dewan perwakilan rakyat

Banyak istilah yang menyangkut konteks ilmiah, istilah "etika" pun berasal dari bahasa Yunani kuno. Kata Yunani *ethos* dalam bentuk tunggal mempunyai banyak arti: tempat tinggal yang biasa; padang rumput, kandang, habitat; kebiasaan, ini mengubah lagi penjelasannya tentang kata "etika". Sejak edisi ke-2 (1991) KBI memberikan dua entri yang berbeda: "etik" (dalam edisi 1988 belum ada) dan "etile". "Etik" meliputi arti ke-2 dan ke-3 dari "etika" dalam edisi 1988, sedangkan "etika" dikhususkan untuk ilmunya.

Tentu, pada masyarakat di belahan dunia manapun, terdapat nilai-nilai dasar perilaku yang secara umum diakui sebagai norma yang harus dipatuhi, selain peraturan atau norma hukum. Norma tersebut biasa disebut etika. Etika dalam arti sempit sering dipahami masyarakat sebagai sopan santun. Sedangkan etika secara umum/luas adalah suatu norma atau aturan yang dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku di masyarakat bagi seseorang terkait dengan sifat baik dan buruk. Etika merupakan suatu ilmu tentang kesusilaan dan perilaku manusia di dalam pergaulannya dengan sesama yang menyangkut prinsip dan aturan tentang tingkah laku yang benar. Dengan kata lain, etika adalah kewajiban dan tanggungjawab moral setiap orang dalam berperilaku di masyarakat.

Sementara itu Sidi Gazalba dalam karya klasiknya, *Sistematika Filsafat*, menyuguhkan beberapa pengertian etika dari para ahli:

1. *Ensiklopedia Wiker Prins*: Etika adalah bagian filsafat yang memperkembangkan teori tentang tindakan; hujah-hujahnya dan tujuan yang diarah; diarahkn kepada makna tindakan.
2. *New American Encyclopedia*: Etika adalah ilmu tentang filsafat moral, tidak mengenai fakta, tapi tentang nilai-nilai; tidak mengenai sifat tindakan manusia, tapi tentang idenya, karena itu bukan ilmu yang positif tapi yang normatif.
3. *A.S. Hornby Dictionart*: Etika adalah ilmu tentang moral atau prinsip-prinsip kaidah-kaidah moral tentang tindakan dan kelakuan.
4. *A Handbook of Christiab Ethic*: Etika adalah ilmu normatif, memandang manusia sebagai tenaga moral, mempertimbangkan tindakan kebiasaanya dan karakter dengan tinjauan tentang benar atau salahnya, kecenderungannya kepada yang baik dan buruk.

Etika Politik mencakup kajian mendalam tentang norma-norma, nilai-nilai, prinsip-prinsip moral, dan standar perilaku yang mengatur aktivitas politik dalam suatu masyarakat atau Negara. Etika politik tidak sekadar mengatur bagaimana individu atau lembaga politik seharusnya bertindak, tetapi juga menentukan bagaimana keputusan politik dibuat, dipertanggungjawabkan, dan diimplementasikan dengan mempertimbangkan nilai-nilai moral yang relevan.

Dalam konteks lembaga legislatif seperti DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), etika politik sangat penting. DPR merupakan lembaga yang mewakili suara rakyat dalam proses pembuatan undang-undang dan pengawasan pemerintahan. Etika politik dalam DPR menyangkut kewajiban anggota DPR untuk bertindak secara jujur, adil, dan transparan dalam menjalankan fungsi-fungsinya.

Aspek keadilan menjadi fokus utama dalam penerapan etika politik di DPR. Keadilan sosial, ekonomi, dan politik harus tercermin dalam kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh DPR. Keadilan sosial berarti memastikan bahwa kebijakan publik memberikan manfaat yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat, tanpa memihak kepada kelompok tertentu. Keadilan ekonomi menuntut distribusi sumber daya ekonomi secara adil, sehingga kesenjangan sosial dan ekonomi dapat diminimalkan. Sementara itu, keadilan politik menjamin bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam proses politik dan untuk diwakili dengan setara di dalam DPR.

Implementasi etika politik yang baik di DPR juga mengharuskan transparansi yang tinggi dalam semua tahapan proses legislasi dan pengawasan. Keputusan-keputusan yang diambil harus didasarkan pada pertimbangan yang matang terhadap kepentingan publik dan dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi masyarakat secara keseluruhan. Akuntabilitas juga menjadi unsur krusial, di mana anggota DPR bertanggung jawab atas keputusan-keputusan yang mereka buat kepada konstituen dan masyarakat umum.

Dengan menerapkan etika politik yang kuat, DPR dapat memperkuat legitimasi mereka sebagai wakil rakyat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi politik. Hal ini tidak hanya menciptakan kondisi yang lebih stabil secara politik, tetapi juga mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan demikian, pentingnya etika politik dalam pembangunan bangsa melalui lembaga DPR tidak dapat dipandang remeh, karena hal ini menentukan arah dan karakter dari demokrasi dan pemerintahan yang ada.

KESIMPULAN

Etika politik yang kuat dalam DPR sangat penting untuk memastikan bahwa anggota DPR menjalankan tugas mereka dengan integritas, transparansi, dan akuntabilitas yang tinggi. Ini tidak hanya mencakup kepatuhan terhadap prinsip-prinsip moral dan perilaku yang diharapkan, tetapi juga representasi yang baik terhadap kepentingan publik yang mereka wakili. Etika politik juga menekankan pentingnya kolaborasi, konsensus, dan penghormatan terhadap proses hukum serta konstitusi sebagai fondasi dari kegiatan legislatif.

Dengan menerapkan etika politik yang kokoh, DPR dapat memperkuat legitimasi mereka sebagai wakil rakyat, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi politik, dan mendukung pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pengembangan dan penerapan etika politik yang baik di DPR tidak hanya merupakan kewajiban moral, tetapi juga krusial untuk membangun demokrasi yang kuat dan menghormati nilai-nilai Pancasila sebagai landasan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Ferdinand, Gregorius Ricky, Efendi Madallo, Reinaldi Palamba, Rigel Josua, Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, and others, 'Ferdinand, Gregorius Ricky Madallo, Efendi Palamba, Reinaldi Josua, Rigel Manajemen, Jurusan Ekonomi, Fakultas Jaya, Universitas Atma', 2017, 3
- Ghaffar, Ahmed Abdel, 'Misba Hoiriah Hasibuan Analisa pemikiran etika politik Islam menurut Ibnu Khaldun (Studi Tokoh) h.1', Misba Hoiriah, 20 (2016), 1
- Ilham, 'Konsep 'Ashabiyah Dalam Pemikiran Politik Ibnu Khaldun', Jurnal Politik Profetik, 4.1 (2016), 1–13
- Kurniati, Kurniati, 'Sistem Politik Demokrasi Dalam Bias Hegemoni Negara : Telaah Gagasan Politik Antonio Gramsci', Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan, 7.2 (2018), 257 <<https://doi.org/10.24252/ad.v7i2.7022>>
- Alfarisyi, M. D., Al Hasani, N., & Maulia, S. T. (2022). Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu Melalui Pendidikan Demokrasi. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 1(1), 151–161
- Alfarisyi, M. D., Al Hasani, N., & Maulia, S. T. (2022). Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu Melalui Pendidikan Demokrasi. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 1(1), 151–161.
- Arsyad sobby kesuma, etika politik dalam dan aplikasinya di Indonesia, Bandar Lampung : institute agama negeri raden intan Lampung, 2009), h.3
- Ayi Sofyan, Etika Politik , (Bandung : Pustaka Setia, 2012), h.38
- Brian Thompson, 1997, *Textbook on Constitutional and Administrative Law*, Ondon, Blackstone Press Ltd., h. 3
- Dadang Suwanda, Peningkatan Fungsi DPRD Dalam Penyusunan PERDA yang Responsif, Ctk. Perama, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2016, h. 17.
- Fajlurrahman Jurdi, Pengantar Hukum Pemilihan Umum, Kencana, 2018, Jakarta, h. 78
- Franz Magnis Suseno, 1991, Etika Politik, Jakarta, Gramedia, h. 114
- Iskandar syukur, al-adadalah jurnal politik, hukum, dan kebudayaan , vol 7 No.1 juni 2008, (Bandar Lampung : gedung fakultas syari'ah, 2008), h.887
- Jimly Assiddiqie-I, 2010, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta, Raja Grafindo utama.
- Khobiburrohma, E. N., Margareta, P. S., & Hasbullah, M. S. H. (2020). Penerapan Sistem Merit Dalam Birokrasi Indonesia Untuk Mewujudkan Good Governance. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 3(2), 139–148.
- Koswara, W., Guntara, D., Abas, M., & Lubis, A. (2023). Analisis Yuridis Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. *UNES Law Review*, 6(1), 2428–2436
- Mahfud MD, 2003, Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Jakarta, Rineka Cipta.
- Mahfud MD, 2017, Politik Hukum di Indonesia, Jakarta, Rajawali Pers.
- Matthew Justin Streb, 2013, *Law and Election Politics: The Rules of the Game*, New York, Routledge, dalam Muhammad Siddiq Armia dkk, Penghapusan Presidential Threshold Sebagai Upaya Pemulihan Hak-hak Konstitusional, 2016, Petita, Volume 1 Nomor 2, h.135.
- Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Ctk. Ketiga, Gramedia, Jakarta, 2007, h. 69.
- Moh Kusnardi dan Bintan R Saragih, Ilmu Negara, Ctk. Kedua, Edisi Revisi, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1995, h. 165.
- Ramlan Surbakti, 2014, Pemilu Berintegritas dan Adil, Harian Kompas edisi 14 Februari, h. 6.
- Sabrina, S., & Khalid, K. (2023). Analisis pemberhentian hakim mahkamah konstitusi Aswanto oleh dewan perwakilan rakyat ditinjau dari ketatanegaraan di Indonesia. Analisis Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Ditinjau Dari

- Ketatanegaraan Di Indonesia, 9(2), 815–824.
- Soehino, Ilmu Negara, Ctk. Ketujuh, Edisi Ketiga, Liberty, Yogyakarta, 1998, h. 248-254
- Tarigan, U. (2013). Politik Pembangunan Partai Politik Islam: Studi Pemikiran Politik Pembangunan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
- Tarigan, U., & Hasibuan, M. A. (2013). Pengaruh Kepemimpinan Dalam Peningkatan Koordinasi Kerja di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)
- Taufiqurrahman Syahuri, 2011, Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Zakaria, A. A., Siregar, A. F., & Hofiefah, H. H. (2023). Analisis Etika dan Moral: Skandal Korupsi Menteri Pertanian. *Nusantara Journal of Multidisciplinary Science*, 1(5), 1093–1103.